

ANALISIS DETERMINAN KRIMINALITAS DI KALIMANTAN TIMUR DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: PENDEKATAN REGRESI BINOMIAL NEGATIF

*(Analysis Of Crime Determinants In Kalimantan Timur In The Context Of The
Development Of The National Capital: A Negatif Binomial Regression Approach)*

Nurul Istiqomah¹

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur¹

E-mail: n.istiqomah2003@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi sosial-ekonomi di Kalimantan Timur akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menciptakan dinamika baru yang memengaruhi stabilitas keamanan, terutama melalui peningkatan angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi tingkat kriminalitas di kabupaten/kota Kalimantan Timur pada tahun 2023. Pendekatan regresi binomial negatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel sosial-ekonomi, seperti kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), rata-rata upah buruh/pegawai, upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan belanja pemerintah terhadap tingkat kriminalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), rata-rata upah buruh/pegawai, UMK, dan belanja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas, sementara TPT tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik. Temuan ini menggarisbawahi peran tekanan sosial-ekonomi sebagai pemicu utama kriminalitas di wilayah urban dan semi-urban.

Kata kunci: Kriminalitas, Kepadatan, Kemiskinan, Ketimpangan, Pengangguran,

ABSTRACT

The socio-economic transformation in East Kalimantan due to the development of the Nusantara Capital City (IKN) has created new dynamics that affect security stability, especially through an increase in crime rates. This study aims to analyze socio-economic factors that affect the crime rate in East Kalimantan districts/cities in 2023. The negative binomial regression approach is used to test the relationship between socio-economic variables, such as population density, percentage of the poor, open unemployment rate (TPT), income inequality (Gini Ratio), average labor/employee wages, district/city minimum wage (MSE), and government spending on crime rates. The results showed that population density, percentage of poor population, income inequality (Gini Ratio), average wages of workers/employees, MSEs, and government expenditure had a significant influence on crime, while TPT did not show a statistically significant relationship. These findings underscore the role of socio-economic pressures as a major driver of crime in urban and semi-urban areas.

Keywords: Crime, Density, Poverty, Inequality, Unemployment

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah, karena sering kali mencerminkan ketegangan sosial yang ada. Tingkat kriminalitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (Rosyidi, 2017; Pare & Felson, 2014). Faktor-faktor ini sering kali saling terkait dan membentuk tekanan sosial yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Di tengah proses perubahan besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, urbanisasi yang pesat, migrasi penduduk, serta meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi memperburuk ketegangan ini. Dampaknya adalah peningkatan angka kriminalitas yang mencerminkan ketidakstabilan sosial yang semakin tajam di wilayah tersebut. Data dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah kasus kriminalitas, yang meningkat sebesar 64,92% dari 3.911 kasus pada 2021 menjadi 6.452 kasus pada 2023. Peningkatan ini tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, tetapi juga terjadi di berbagai kabupaten dan kota lainnya, mencerminkan dampak sosial-ekonomi yang meluas akibat transformasi besar di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana faktor-faktor sosial-ekonomi, seperti kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, memengaruhi tingkat kriminalitas di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada tahun 2023. Berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti Rosyidi (2017) dan Pare & Felson (2014), ketimpangan pendapatan kerap menjadi pemicu ketegangan sosial yang mendorong kriminalitas, sementara Purwanti & Widyaningsih (2019) serta Suci et al. (2020) menyoroti peran kepadatan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran sebagai determinan utama kriminalitas di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada Kalimantan Timur yang tengah menghadapi transformasi besar akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik dengan mengintegrasikan berbagai variabel sosial-ekonomi, seperti kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, rata-rata upah buruh, upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan belanja pemerintah daerah, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang determinan kriminalitas di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana setiap faktor memengaruhi tingkat kriminalitas, baik di wilayah yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN maupun di daerah lainnya yang menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang beragam.

Regresi binomial negatif digunakan dalam penelitian ini karena data kriminalitas berbentuk count data (jumlah kejadian) yang bersifat diskrit dan non-negatif, namun menunjukkan overdispersi—situasi di mana varians data lebih besar dibandingkan rata-rata. Model binomial negatif dipilih untuk mengatasi keterbatasan Regresi Poisson seperti overdispersi, sehingga mampu menghasilkan estimasi yang lebih akurat dalam konteks ini. Model binomial negatif menggunakan fungsi *log-linier* untuk menghubungkan ekspektasi jumlah tindak kriminalitas (μ) dengan kombinasi variabel bebas. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pengaruh setiap variabel terhadap jumlah tindak kriminalitas, sekaligus mempertimbangkan variasi risiko antar kabupaten/kota berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam.

METODE

Penelitian ini berfokus pada analisis tingkat kriminalitas di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023. Variabel tak bebas (Y) dalam penelitian ini adalah jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan, yang datanya diperoleh dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur. Variabel bebas (X) yang dianalisis meliputi kepadatan penduduk (X_1), persentase penduduk miskin (X_2), tingkat pengangguran terbuka (X_3), rasio gini (X_4), rata-rata upah buruh (X_5), upah minimum kabupaten/ kota (X_6), dan belanja pemerintah (X_7) dengan data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Regresi binomial negatif digunakan dalam penelitian ini karena variabel tak bebas (jumlah tindak kriminalitas yang dilaporkan) berupa count data, yaitu data diskrit yang hanya memiliki nilai bilangan bulat non-negatif. Model binomial negatif dipilih untuk mengatasi masalah *overdispersion*, yakni situasi di mana varians data lebih besar daripada rata-rata ($Var(y) > E(y)$), yang menyebabkan model Poisson kurang sesuai untuk data ini. Hilbe & Joseph M (2011), menjelaskan Rumus dasar binomial negatif adalah

$$P((y_i | \mu_i, \theta)) = \frac{\Gamma(y_i + \theta^{-1})}{\Gamma(y_i + 1)\Gamma(\theta^{-1})} \left(\frac{\theta^{-1}}{\theta^{-1} + \mu_i}\right)^{\theta^{-1}} \left(\frac{\mu_i}{\theta^{-1} + \mu_i}\right)^{y_i} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

- y_i : jumlah tindak kriminalitas yang dilaporkan di wilayah ke- i
- μ_i : ekspektasi atau rata-rata jumlah tindak kriminalitas di wilayah ke- i
- θ : parameter dispersi yang mencerminkan tingkat overdispersi
- $\Gamma(.)$: fungsi *gamma*

Hubungan antara μ_i dan variabel bebas (X) dalam model ditentukan oleh fungsi log linier sebagai berikut :

$$\ln(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i} + \beta_7 X_{7i} \dots\dots\dots (2)$$

Atau secara eksponensial

$$\mu_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i} + \beta_7 X_{7i}) \dots\dots\dots (3)$$

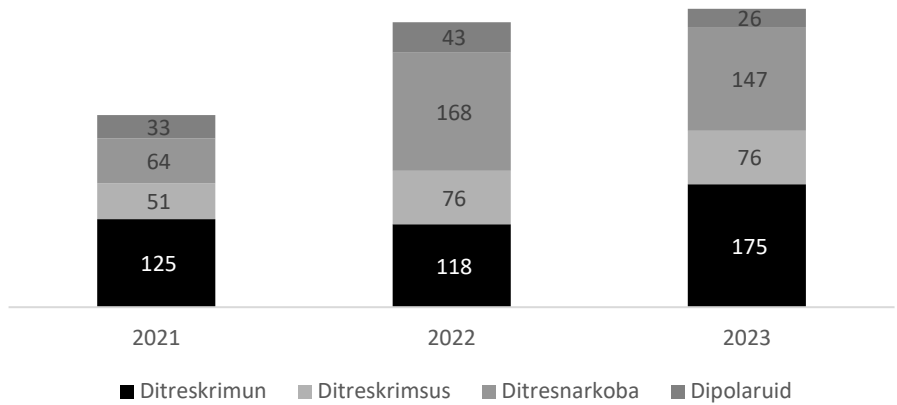
dimana:

- μ_i : Nilai ekspektasi atau rata-rata jumlah tindak kriminalitas di wilayah ke- i
- β_0 : Konstanta model
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_7$: Koefisien regresi untuk variabel bebas $X_{1i}, X_{2i} \dots X_{7i}$
- X_{1i} : Kepadatan penduduk di wilayah i
- X_{2i} : Persentase penduduk miskin wilayah i
- X_{3i} : Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah i
- X_{4i} : Rasio Gini wilayah i
- X_{5i} : Rata-rata upah buruh/ karyawan wilayah i
- X_{6i} : Upah minimum wilayah i
- X_{7i} : Belanja pemerintah daerah wilayah i

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software statistik R.

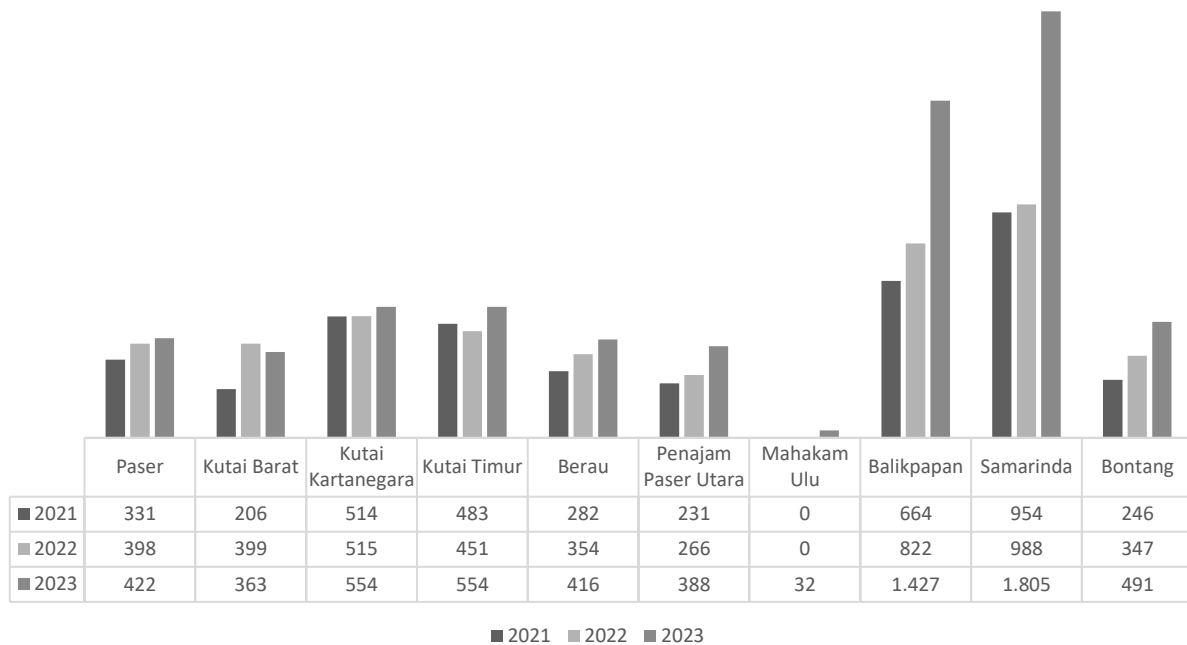
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi. Di Kalimantan Timur, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah membawa perubahan sosial-ekonomi yang signifikan, tetapi juga memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya angka kriminalitas. Data menunjukkan lonjakan jumlah kasus dari 3.911 pada 2021 menjadi 6.452 pada 2023, meningkat 64,92% dalam tiga tahun terakhir. Urbanisasi yang pesat, migrasi penduduk, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin tajam menjadi faktor utama yang memperburuk ketegangan di masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pola kriminalitas yang beragam. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mencatat kenaikan 40% dalam kasus kejahatan konvensional. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) tetap stabil setelah mengalami kenaikan sebesar 49,02% pada tahun 2022. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) mengalami lonjakan kasus hingga 162,50% pada tahun 2022, sebelum turun sebesar 12,50% pada tahun 2023. Sementara itu, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dipolaruid) mencatat penurunan konsisten sebesar 21,21%.

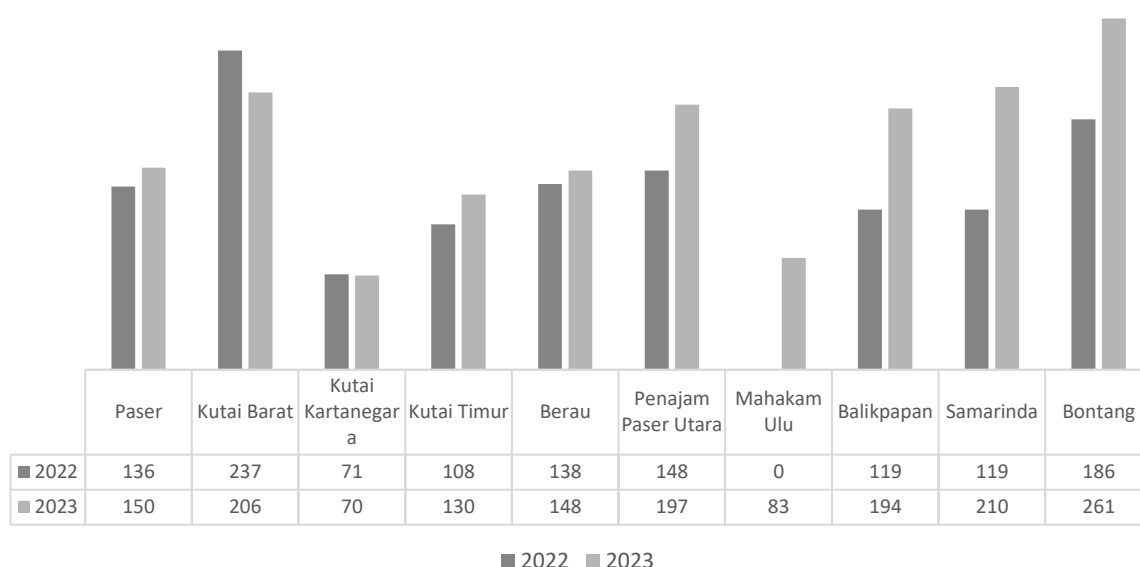


Gambar 1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Polda Kalimantan Timur menurut Direktorat Tahun 2021-2023

Pada tingkat kabupaten/kota, Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara (PPU) mencatatkan lonjakan tertinggi, dengan Samarinda mengalami peningkatan 89,24% dari 954 kasus pada 2021 menjadi 1.805 kasus pada 2023, sedangkan Balikpapan dan PPU masing-masing naik 114,91% dan 67,97%. Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk juga meningkat dari 131 pada 2022 menjadi 178 pada 2023, dengan lonjakan tertinggi di Samarinda (76,47%), Balikpapan (62,18%), dan PPU (33,11%). Peningkatan ini mencerminkan tekanan sosial-ekonomi yang memerlukan mitigasi risiko strategis, termasuk penyediaan lapangan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengawasan intensif untuk menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan besar akibat pembangunan IKN.



Gambar 2. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan pada Kepolisian Resort di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2023



Gambar 3. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 1000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2023

Peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kriminalitas yang tercatat di Kalimantan Timur, seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 1 maupun Grafik 2 mencerminkan tekanan sosial-ekonomi yang semakin tajam di wilayah tersebut. Grafik-grafik ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang tren kriminalitas yang berkembang, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami urbanisasi dan migrasi tinggi, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara. Untuk memastikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tren ini, analisis statistik diperlukan. Penggunaan regresi binomial negatif, yang dipilih berdasarkan analisis dispersi rasio yang menunjukkan adanya underdispersion, memungkinkan model ini untuk mengakomodasi variasi data yang lebih kecil dari yang diasumsikan oleh model Poisson (Hilbe&Joseph M, 2011). Dengan pendekatan ini, hasil analisis statistik dapat memberikan wawasan yang lebih tepat tentang hubungan antara variabel sosial-ekonomi dan tingkat kriminalitas, serta memperkuat pemahaman tentang dinamika yang memengaruhi angka kriminalitas di Kalimantan Timur.

Tabel 1. Uji Goodness of Fit Regresi Poisson

	Value	df	Value/df
Deviance	1135,266	5	271,053
Pearson Chi-Square	1152,825	5	230,565

* df <<< 1 maka terjadi overdispersi

Sumber : Pengolahan Data

Dalam analisis data kriminalitas, pemilihan model statistik yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Pada kasus ini, nilai dispersi rasio sebesar 0,687 mengindikasikan adanya underdispersion, di mana variasi data kriminalitas lebih kecil dibandingkan dengan yang diasumsikan oleh model Poisson. Kondisi ini menunjukkan bahwa regresi binomial negatif merupakan pilihan model yang lebih tepat, karena mampu mengakomodasi variasi data yang tidak sesuai dengan asumsi distribusi Poisson. Dengan menggunakan regresi binomial negatif, analisis ini dapat memberikan estimasi yang lebih akurat dalam menggambarkan hubungan antara faktor-faktor sosial-ekonomi dengan tingkat kriminalitas, serta meminimalkan potensi kesalahan interpretasi yang dapat muncul jika menggunakan model yang tidak tepat.

Tabel 2. Hasil Uji Overdispersion Test Binomial Negatif

R Square	0,279914
Dispersi Ratio	0,687
P-value	0,904

Sumber : Pengolahan Data

Dengan pendekatan ini, analisis menunjukkan bahwa variabel sosial-ekonomi seperti kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, rasio gini, rata-rata upah buruh/karyawan, upah minimum kabupaten/kota, dan belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Hasil ini menegaskan bahwa konsentrasi penduduk yang tinggi dan ketimpangan ekonomi berfungsi sebagai pendorong utama meningkatnya kasus kriminalitas. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kriminalitas, yang mungkin disebabkan oleh dinamika pasar kerja atau kondisi sosial-ekonomi lokal yang tidak tercermin secara langsung dalam tingkat pengangguran terbuka. Hilbe&Joseph M (2011) menyatakan menggunakan regresi binomial negatif, penelitian ini memberikan temuan yang lebih valid dan relevan karena menghasilkan pendugaan yang tidak bias, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan di wilayah ini.

Tabel 1. P-Value dan Estimasi Parameter

Variabel	P-value	β	$\exp \beta$
Kepadatan Penduduk	1,49E-12	0,0015332	1,001534376
Persentase Penduduk Miskin	5,71E-05	0,1657949	1,180330991
Rasio Gini	2,81E-06	13,2902815	591419,8794
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,3516	-0,0564009	0,945160145
Rata-Rata Upah Buruh / Karyawan	0,0282	-0,3443027	0,708714368
Upah Minimum Kabupaten / Kota	1,85E-13	0,2448639	1,277447441
Belanja Pemerintah Daerah	2,00E-16	0,9087238	2,481154063

Sumber: hasil pengolahan

Kepadatan Penduduk dan Kriminalitas

Berdasarkan hasil analisis regresi binomial negatif, setiap penambahan penduduk 1 orang per kilometer persegi (km²) di Kalimantan Timur dapat meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 0,15% ($\text{Exp}(\beta) = 1,001534376$). Meskipun peningkatan ini terlihat kecil dalam skala individu, akumulasi perubahan dalam konteks urbanisasi yang cepat dapat memberikan dampak yang signifikan. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah, semakin besar potensi konflik sosial yang dapat memicu tindak kriminal.

Stokols, D. (1972) menyatakan bahwa di wilayah dengan kepadatan tinggi, interaksi sosial yang lebih intensif cenderung meningkatkan potensi konflik antar individu. Konflik ini sering kali dipicu oleh persaingan dalam mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti pekerjaan, perumahan, dan akses terhadap layanan sosial. Ketegangan sosial yang dihasilkan dari persaingan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap tindak kriminal.

Penelitian sebelumnya juga memperkuat pandangan ini. Studi oleh Putra et al. (2020) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh langsung terhadap kriminalitas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan di suatu daerah, semakin besar kemungkinan terjadinya kejahatan. Selain itu, penelitian oleh Purwanti & Widyaningsih (2019) juga mengungkapkan bahwa kepadatan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran merupakan

faktor signifikan yang memengaruhi tingkat kriminalitas, khususnya di Jawa Timur. Penelitian tersebut menyoroti bahwa tingginya tingkat persaingan di daerah dengan kepadatan tinggi dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi dan memicu perilaku kriminal.

Kawasan dengan kepadatan tinggi sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal pengelolaan sosial dan ekonomi, terutama ketika infrastruktur dan kebijakan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Hal ini menjadikan pengendalian kepadatan penduduk sebagai salah satu aspek penting dalam mengurangi risiko kriminalitas.

Dalam konteks Kalimantan Timur, terutama di Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara (PPU)—yang menjadi episentrum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)—lonjakan migrasi akibat urbanisasi pesat turut meningkatkan kepadatan penduduk. PPU, sebagai salah satu wilayah inti pembangunan IKN, menghadapi perubahan demografis yang signifikan, dengan tingginya arus pendatang yang mencari peluang kerja. Data BPS Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan penduduk PPU dalam kurun 2020-2024 mencapai 11,38 persen jauh di atas rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang hanya mencapai 1,93 persen. Hal ini menambah tekanan pada infrastruktur dan layanan publik yang belum sepenuhnya siap. Ketegangan sosial akibat keterbatasan fasilitas publik dan meningkatnya persaingan ekonomi memperburuk situasi keamanan, sehingga berpotensi memicu lonjakan kriminalitas.

Kemiskinan dan Kriminalitas

Kemiskinan sering kali menjadi isu mendasar yang memengaruhi berbagai aspek sosial, termasuk tingkat kriminalitas. Berdasarkan penelitian ini, setiap kenaikan 1% dalam persentase penduduk miskin dapat meningkatkan angka kriminalitas hingga 18,03%, sebagaimana tercermin dari nilai $\exp(\beta)$ sebesar 1,1803. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin sering kali mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas, seperti melakukan tindakan kriminal, demi memenuhi kebutuhan dasar yang sulit terpenuhi. Fenomena ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan.

Fenomena hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas tidak hanya ditemukan di Kalimantan Timur. Penelitian serupa di Jawa Timur oleh Purwanti dan Widyaningsih (2019) menemukan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kriminalitas. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan ketidaksetaraan ekonomi menciptakan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya memicu konflik dan meningkatkan risiko kejahatan. Kondisi ini semakin diperparah oleh terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja yang memadai.

Penelitian lain oleh Suci Rahmalia et al. (2020) juga mendukung temuan ini, menyimpulkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap angka kriminalitas. Semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu wilayah, semakin besar kemungkinan peningkatan tindak kejahatan. Hal ini menggambarkan bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sering kali menjadi pemicu utama perilaku kriminal, karena tekanan ekonomi yang tidak tertangani.

Di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Jabodetabek, penelitian Zamahsary Martha et al. (2022) mengungkapkan bahwa kemiskinan adalah salah satu faktor paling signifikan yang mendorong kriminalitas. Tekanan hidup di lingkungan dengan biaya hidup yang tinggi, persaingan ekonomi yang ketat, serta akses terbatas ke peluang ekonomi menciptakan kondisi yang memicu tindak kejahatan.

Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Dengan p-value yang sangat kecil ($2,81E-06$), yang jauh di bawah ambang batas signifikansi 0,05, temuan ini menguatkan hipotesis bahwa ketimpangan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan kejahatan. Koefisien β untuk rasio gini sebesar 13,2902815 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kecil dalam ketimpangan pendapatan berpotensi memperburuk tingkat kriminalitas. Bahkan, dengan

nilai $\exp(\beta)$ yang luar biasa besar, dapat dipahami bahwa meskipun pergerakan kecil dalam rasio gini, dampaknya terhadap kriminalitas dapat sangat signifikan.

Ketimpangan pendapatan, yang tercermin dalam tingginya rasio gini, memicu ketidakpuasan sosial yang dapat memperburuk ketegangan antar kelompok masyarakat. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi, seperti pendidikan dan pekerjaan, sering kali membuat individu yang berada di lapisan bawah merasa frustrasi dan terpinggirkan. Frustrasi ini, yang muncul dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dapat mendorong sebagian individu untuk beralih ke tindakan kriminal sebagai cara untuk mengatasi kesulitan hidup mereka. Fenomena ini semakin jelas terlihat di wilayah-wilayah dengan urbanisasi cepat, seperti Kalimantan Timur, yang tengah mengalami lonjakan angka kriminalitas akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penemuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Simangunsong (2024), yang menunjukkan bahwa rasio gini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Penelitian serupa di Banjarmasin oleh Septaria dan Zulfaridatulyaqin (2021) juga menemukan bahwa ketimpangan ekonomi, yang tercermin melalui rasio gini, berperan sebagai faktor dominan dalam mendorong tingkat kejahatan. Sementara itu, meskipun kemiskinan dan ketidakmerataan kesempatan kerja juga berpengaruh, ketimpangan pendapatanlah yang sering kali menjadi pendorong utama bagi munculnya ketegangan sosial dan kriminalitas.

Upah Buruh dan Kriminalitas

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dua variabel terkait upah, yaitu rata-rata upah buruh/karyawan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kalimantan Timur. Analisis ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan pengupahan dan kondisi pasar tenaga kerja memengaruhi dinamika sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

Untuk rata-rata upah buruh/karyawan, hasil analisis menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas, dengan p-value di bawah 0,05 dan koefisien β sebesar -0,3443027. Nilai $\exp(\beta)$ sebesar 0,7087 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu unit rata-rata upah buruh/karyawan dapat menurunkan tingkat kriminalitas sekitar 29,13%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika buruh atau karyawan mendapatkan upah yang lebih tinggi, tekanan ekonomi mereka berkurang, yang pada gilirannya mengurangi insentif untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Peningkatan upah memberikan kestabilan ekonomi bagi individu, meningkatkan akses mereka ke kebutuhan dasar, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih sah. Kondisi ini juga mengurangi tekanan sosial yang sering kali menjadi salah satu pemicu tindakan kriminal.

Sebaliknya, UMK menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan tingkat kriminalitas, dengan koefisien β sebesar 0,9087238 dan nilai $\exp(\beta)$ sebesar 2,4811. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satu unit dalam UMK dapat meningkatkan tingkat kriminalitas hingga hampir dua setengah kali lipat. Meskipun UMK dirancang untuk melindungi buruh dari eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka, temuan ini mengungkapkan sisi lain dari kebijakan tersebut. Kenaikan UMK yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup atau peningkatan produktivitas perusahaan dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi. Beban kenaikan biaya tenaga kerja pada pengusaha dapat memicu pengurangan tenaga kerja atau bahkan peningkatan pengangguran, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan potensi tindak kriminal di wilayah tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bell dan Machin (2019), yang menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum dapat memiliki dampak ganda terhadap kriminalitas. Di satu sisi, peningkatan upah minimum dapat mengurangi kriminalitas ekonomi dengan meningkatkan pendapatan buruh. Namun, di sisi lain, jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan pengelolaan pasar tenaga kerja yang baik, dapat memicu ketegangan sosial akibat pengangguran atau ketimpangan baru. Bell dan Machin juga menekankan bahwa dampak kebijakan upah minimum terhadap kriminalitas sangat bergantung pada konteks lokal, termasuk kondisi pasar tenaga kerja, daya saing industri, dan ketersediaan lapangan kerja.

Belanja Pemerintah dan Kriminalitas

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kalimantan Timur, dengan p-value yang sangat kecil ($1,85E-13$), jauh di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Koefisien β sebesar 0,2448639 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam belanja pemerintah daerah berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 27,74%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai $\exp(\beta)$ sebesar 1,2774. Temuan ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara pengeluaran publik, migrasi, dan stabilitas sosial, terutama dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pembangunan besar-besaran IKN mendorong lonjakan belanja pemerintah daerah, terutama untuk infrastruktur, yang menciptakan berbagai konsekuensi sosial-ekonomi. Dalam teori ekonomi, peningkatan belanja pemerintah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kriminalitas dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses infrastruktur, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, alokasi belanja yang tidak merata atau tidak efisien dapat menciptakan efek sebaliknya, terutama di wilayah yang menghadapi arus migrasi besar-besaran dan ketimpangan sosial yang tajam.

Penelitian Buonanno dan Montolio (2008) menunjukkan bahwa peningkatan belanja infrastruktur sering kali dikaitkan dengan peningkatan migrasi tenaga kerja ke wilayah tersebut. Dalam konteks Kalimantan Timur, pembangunan IKN menarik ribuan pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia. Migrasi ini menciptakan tekanan besar pada infrastruktur sosial dan ekonomi lokal, seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketika kebutuhan dasar pendatang tidak terpenuhi, konflik sosial dapat muncul, yang sering kali menjadi pemicu meningkatnya tindakan kriminal, baik dalam bentuk kriminalitas ekonomi (seperti pencurian) maupun kejahatan kekerasan.

Fajnzylber, Lederman, dan Loayza (2002) juga menyoroti bahwa proyek-proyek besar yang tidak disertai dengan strategi pengelolaan sosial yang efektif dapat memperburuk ketimpangan dan menciptakan peluang tindak kriminal. Dalam kasus Kalimantan Timur, konsentrasi belanja pada proyek infrastruktur besar seperti jalan, gedung pemerintahan, atau fasilitas publik untuk mendukung IKN dapat meninggalkan kesenjangan dalam alokasi dana bagi kebutuhan sosial lainnya. Ketimpangan ini meningkatkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan, sehingga memperbesar potensi kejahatan.

Selain itu, Sachsida et al. (2010) menegaskan bahwa belanja besar tanpa pengawasan ketat sering kali memicu kriminalitas terorganisir, terutama korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek besar. Di Kalimantan Timur, percepatan pembangunan IKN membuka peluang bagi penyalahgunaan dana publik, yang tidak hanya menciptakan kerugian ekonomi tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi yang terkait dengan belanja publik dapat menciptakan efek domino berupa ketidakstabilan sosial dan meningkatnya kriminalitas di tingkat masyarakat.

Di sisi lain, jika belanja pemerintah diarahkan secara strategis dan inklusif, dampaknya dapat menjadi positif. Penelitian Dabla-Norris, Kochhar, dan Suphaphiphat (2015) menunjukkan bahwa belanja publik yang fokus pada pengentasan ketimpangan, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, dapat menekan angka kriminalitas dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kalimantan Timur, strategi seperti ini dapat mengurangi tekanan sosial akibat migrasi dan memastikan bahwa manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun belanja pemerintah daerah berpotensi meningkatkan kriminalitas jika tidak dikelola dengan baik, hal ini juga dapat menjadi alat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi jika dirancang dengan strategi yang inklusif. Pemerintah daerah Kalimantan Timur perlu memastikan bahwa anggaran belanja, terutama untuk pembangunan IKN, tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan investasi sosial yang dapat mengurangi ketimpangan dan ketegangan sosial. Langkah ini sangat penting untuk mencegah kriminalitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah yang sedang mengalami transformasi besar-besaran.

KESIMPULAN

Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya kriminalitas. Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin sering kali membuat mereka terpaksa mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya memicu tindakan kriminal. Selain itu, kepadatan penduduk dan ketimpangan pendapatan juga berkontribusi besar terhadap tingkat kriminalitas. Semakin padat suatu wilayah, semakin besar peluang terjadinya ketegangan sosial akibat persaingan sumber daya yang terbatas. Ketimpangan ekonomi, terutama yang terlihat dalam disparitas antara kelompok kaya dan miskin, memperburuk kondisi ini, menciptakan rasa ketidakpuasan sosial yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai respons terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.

Selain faktor-faktor tersebut, kebijakan upah juga memainkan peran penting. Peningkatan upah buruh dapat mengurangi tingkat kriminalitas, karena memberikan kestabilan ekonomi bagi individu dan mengurangi tekanan sosial. Sebaliknya, kebijakan upah minimum yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup justru bisa menambah ketegangan sosial dan meningkatkan kriminalitas. Belanja pemerintah daerah juga turut mempengaruhi tingkat kriminalitas. Peningkatan anggaran untuk pembangunan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan ketegangan antar masyarakat.

SARAN

Untuk menanggulangi kriminalitas secara efektif, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, meliputi:

- Pengentasan kemiskinan melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan daya saing masyarakat, terutama di wilayah urban dan semi-urban.
- Redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal dan investasi sosial yang lebih inklusif, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat memicu ketegangan sosial.
- Pengelolaan arus urbanisasi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN, guna mencegah lonjakan kriminalitas akibat tekanan sosial.
- Kebijakan pengupahan yang berimbang, memastikan bahwa kenaikan upah minimum diiringi dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja untuk menghindari dampak negatif terhadap pasar tenaga kerja.

Untuk agenda penelitian lanjutan, perlu dilakukan:

- Analisis longitudinal untuk memantau perubahan tingkat kriminalitas seiring dengan pembangunan IKN.
- Studi mendalam mengenai efektivitas program-program pengentasan kemiskinan di wilayah urban dan semi-urban di Kalimantan Timur.
- Penelitian terhadap dampak sosial lainnya, seperti migrasi, kualitas layanan publik, dan perubahan pola kerja, yang mungkin memengaruhi tingkat kriminalitas.

Dengan implementasi kebijakan berbasis bukti dan penelitian lanjutan yang terarah, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (2024). Kalimantan Timur Dalam Angka 2024, Samarinda
- Bell, B., & Machin, S. (2019). *The impact of minimum wages on crime rates: Evidence from the UK*. *Cambridge Journal of Economics*, 43(1), 25–50.
- Buonanno, P., & Montolio, D. (2008). *Identifying the socio-economic and demographic determinants of crime across Spanish provinces*. *International Review of Law and Economics*, 28(2), 89–97.

- Dabla-Norris, E., Kochhar, K., & Suphaphiphat, N. (2015). *Causes and consequences of income inequality: A global perspective. International Monetary Fund.*
- Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). *What causes crime?. European Economic Review, 46(7), 1323–1357.*
- Hilbe, J. M. (2011). *Negative binomial regression.* Cambridge University Press.
- Pare, P. P., & Felson, M. (2014). *Income inequality, poverty, and crime across nations. The British Journal of Criminology, 54(3), 382–400.*
- Purwanti, A., & Widyaningsih, R. (2019). Pengaruh kemiskinan, kepadatan penduduk, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 17(1), 45–58.*
- Putra, A. W., Susilo, R., & Hidayat, D. (2020). Kepadatan penduduk dan pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 5(3), 57–64.*
- Rosyidi, R. (2017). Hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial, 12(2), 98–112.*
- Sachsida, A., Mendonça, M. J. C., Loureiro, P. R. A., & Gutierrez, M. A. (2010). *Inequality and criminality revisited: The role of public spending on crime rates. Applied Economics, 42(2), 295–302.*
- Septaria, A., & Zulfaridatulyaqin. (2023). Analisis ketimpangan pendapatan dan dampaknya terhadap kriminalitas di Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi dan Kriminologi, 8(2), 67–78.*
- Simangunsong, R. (2024). *Time-series analysis of income inequality and crime in Indonesia. Journal of Social and Economic Studies, 14(1), 12–25.*
- Stokols, D. (1972). On the distinction between density and crowding: some implications for future research. *Psychological review, 79(3), 275.*
- Suci, R., Haryanto, A., & Novita, D. (2020). Kemiskinan sebagai determinan kriminalitas di daerah perkotaan Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi, 14(1), 23–35.*
- Zamahsary, M., & Martha, Z. (2022). Urbanisasi, kemiskinan, dan pengaruhnya terhadap kriminalitas di wilayah Jabodetabek. *Jurnal Urban dan Regional, 10(1), 31–42.*